

# Punahnya Toponimi Indikasi Erosi Bahasa dan Punahnya Bangsa

Taqyuddin

[taqygeo@gmail.com](mailto:taqygeo@gmail.com)

## Abstrak

“*Geographical names*”, , “nama unsur geografi”, “nama geografis” atau “nama rupabumi”, “*unsur topografis*” “*place names*” atau “nama tempat” “*toponym*”, “*toponimi*”, adalah pengetahuan yang mengkaji riwayat atau asal-usul nama tempat, berbeda dengan *antroponimi* yaitu pengetahuan yang mengkaji riwayat atau asal-usul nama orang atau yang diorangkan. Toponimi merupakan gejala pemberian tanda atau identitas oleh manusia untuk bagian permukaan bumi atau “identitas tempat” atau “*place identity*”. Toponimi merupakan bentuk hasil budaya manusia, toponimi melekat dengan budaya penduduknya. Toponimi menunjukkan pengetahuan dan pengalaman budaya penduduknya dalam memberi nama bagian permukaan bumi sebagai tempat “*place*” tidak sekedar ruang fisik “*space*”, *toponimi* merupakan cerminan realitas internal manusia dalam pemberian nama tempat. Manusia dalam memberi identitas bagian permukaan bumi yang dikenali menurut pengalaman dan pengetahuannya, yang dikenali yaitu; 1. *natural landscape features*, 2. *populated places and localities*, 3. *populated places and localities*, 4. *administrative area*, 5. *transportation route*, 6. *constructed features*. Pola penamaan tempat oleh manusia sesuai dengan bahasa dan bangsanya yang memiliki karakter tersendiri yang dapat dikenali dan ditemukan perbedaannya dengan pola penamaan bagian permukaan bumi lainnya. Setiap bagian permukaan bumi ditangkap oleh manusia yang menemuinya diberi identitasnya sesuai bahasa dan budayanya. Seiring berjalannya waktu (sejarah), tempat “*place*” ada yang belum ditemukan/didefinisikan, belum ditetapkan, sudah ditetapkan dan dikenali hingga kini, ditetapkan dan diubah, ditetapkan dan ditambahkan, sudah ditetapkan dan di mekarkan dengan tambahan nama baru, baru dibuat dan ditetapkan serta didaftar dalam bentuk *gezetter*, bahkan diregistrasikan untuk mendapat pengakuan oleh bangsa-bangsa di dunia melalui PBB, dan ada yang dilupakan, dihilangkan bahkan ada yang indikasinya punah. Punahnya toponimi merupakan indikasi “erosi” bahasa dan pada akhirnya punahnya bahasa, erosi bahasa yang ‘akut’ menunjukkan punahnya bangsa. Kemampuan dunia dalam merekam bahasa lisan dalam bentuk tertulis masih sangat terbatas meskipun sudah ribuan kamus tercetak. Di sisi lain lebih sangat terbatas dalam merekam bahasa yang menunjukkan toponimi, dan lebih sangat-sangat terbatas rekaman itu dalam bentuk peta (lokasional). Teknologi pemetaan sejak abad 21 berkembang begitu pesatnya memberikan kemudahan untuk merekam nama-nama tempat yang mendekati region pendukung bahasa atau pendukung budayanya yang ber-*georeference*. Tetapi terkendala dengan jarangnyanya *cartographer* yang juga ahli bahasa/budaya dan sebaliknya. Untuk itu sinergi multidisiplin dan lintas disiplin linguistik, semiologi/semiotik, antropologi, arkeologi, filologi, geografi, sejarah, teknologi pemetaan dll., merupakan kebutuhan bersama demi menghindarkan punahnya toponimi. Toponimi merupakan penanda warisan budaya.

**Kata Kunci:** toponimi, tanda, identitas tempat, punahnya bahasa, punahnya bangsa

## Pengantar

“Toponimi” dipahami oleh kalangan masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan-bangsa-bangsa sebagai warisan dunia. Toponimi adalah suatu yang penting oleh masyarakat dunia melalui dibuatnya naskah-naskah resolusi PBB, terkait dengan Toponimi. Penamaan tempat yang tidak memiliki akar sejarah yang kuat akan merugikan budaya

pendukungnya/bangsa. “*Toponym*” sebagai jembatan untuk menelusuri kembali masa lampau, menggali apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan suatu bangsa, memahami perkembangan yang telah membentuk suatu bangsa hingga kini. Pengetahuan dan pengalaman suatu bangsa dalam memberikan “*Geographical names*” tidak lepas dari karakter bahasa yang dimilikinya. Melalui bahasa nama-nama itu tercipta, sebagai teks yang merupakan representasi dari pendukung bahasa itu. “Nama unsur geografi”, “nama geografis” atau “nama rupabumi” bukan sekadar nama, namun dapat sebagai pengetahuan, riwayat asal usul nama tempat tersebut (Ayatrohaedi, 1993, p. 10).

Toponimi merupakan gejala pemberian tanda atau identitas oleh manusia untuk bagian permukaan bumi atau “identitas tempat” atau “*place identity*”. Toponimi merupakan bentuk hasil budaya manusia, toponimi melekat dengan budaya pendukungnya, merupakan konstruksi sosial masyarakat ketika itu, lebih bersifat identitas esensial (identitas yang mengacu pada tradisi dan masa lampau). Toponimi menunjukkan pengetahuan dan pengalaman budaya pendukungnya dalam memberi nama bagian permukaan bumi sebagai tempat “*place*” tidak sekedar ruang fisik “*space*”, toponimi merupakan cerminan realitas internal manusia dalam pemberian nama tempat. Pengabaian pentingnya toponimi dikhawatirkan lambat laun akan hilang bersama-sama rasa memiliki dari *host community* (masyarakat lokal setempat) budaya pendukungnya tersebut. Dan jika tidak ada dokumentasi nilai-nilai budaya sebagai pengalaman dan pengetahuan, maka masyarakat baru yang menempati bagian muka bumi itu menjadi *a-historis* tentang toponiminya (punah).

### **Punahnya Toponimi**

Perubahan sosial masyarakat menjadi sekarang, berkonskuensi terjadi perubahan konstruksi masyarakatnya juga, maka nilai-nilai yang tertanam dalam penamaan tempat tidak mampu bertahan dalam masyarakat modern. Tempat dengan nama-nama yang memiliki nilai lebih kuat (dikenal oleh orang banyak dengan sejarah yang menyertainya) atau memiliki nilai jual akan lestari (tidak punah). Bagaimana tempat-tempat yang dianggap tidak memiliki nilai-nilai luhur yang menyertainya dan masyarakat pendukungnya tidak berdaya lagi maka terjadi “aliensi” terdesak oleh masyarakat baru yang lebih kuat.

Pada kasus studi toponimi maka tempat-tempat seperti ini mengalami perubahan nama sesuai dengan keinginan konstruksi masyarakat baru dengan motivasi lebih trendi, lebih menjual,

lebih mencitrakan masyarakat modern, pertimbangan ekonomis praktis atau kondisi konsumsi tingkat tinggi masyarakat modern (Ritzer, *Enchantment A Disenchanted World*). Sebagai contoh: kampung kemiri muka di Depok, sudah samar-samar terdengar di masyarakat kota Depok, dan masyarakat kota Depok tidak tahu menahu bahwa nama Pesona Khayangan asal muasalnya masuk dalam bagian permukaan bumi yang direpresentasikan oleh masyarakat Depok Masa lalu sebagai kawasan Kemiri Muka. Hal seperti ini hampir setiap hari terjadi sangat dinamis di seluruh NKRI. Selain beberapa motivasi di atas, juga terjadi motivasi baik atas dasar pertimbangan obyektif, politik, hukum, birokrasi, arsitektural, bahasa maupun subyektif norma, religi, nilai, tradisi/budaya dan bahkan mistis/metafisis. Hal-hal tersebut dapat dijadikan tema-tema reset dalam ranah toponimi. Masyarakat Jakarta mengenal Pondok Indah, mengenal Kelapa Gading, Karawaci, Blok M, ....indah, ....resident, ... estate, ....., Puri ....., .... Jaya, ...Baru, .... Makmur, ....Dua, ....Empat, ....banyak, ..... utara/selatan/timur/barat, huta..... , dan lain-lain. Fenomena ini tidak terbendung dan tidak bisa dimungkiri. Apakah hal ini merupakan gejala pembentukan identitas interaksional (akibat interaksi sosial yang dinamis).

Ada empat pendekatan interaksional tentang identitas (de Fina *et al.* 2006: 2-5). Menyatakan bahwa identitas bukan sebagai produk, tetapi sebagai proses sosial.

1. “konstruksionisme sosial” (identitas terbentuk saat terjadi interaksi).
2. identitas merupakan sbg proses penetapan suatu kaum sebagai anggota golongan tertentu (“*in-group*” vs. “*out-group*”). Misal, pribumi- pendatang/migran.
3. Identitas dilihat sebagai sesuatu yang “plural” (identitas ditentukan oleh konteks sosial)
4. Pandangan “indeksikal” (ungkapan tempat, waktu, dan lain-lain sebagai label identitas)

Menurut Hood (2014), bahasa tidak hidup sendirian tetapi hidup dengan bahasa lain, inilah yang dimaksud dengan ekologi bahasa. Lebih lanjut menuturkan bahwa bahasa membentuk ruang bagi penuturnya sebagai ruang demografis/geografis dan kognitif, bahasa dan ruang membentuk identitas penuturnya dan bahasa merupakan wahana bagi kebudayaan yang melatarinya dan mendukung identitas penuturnya. Bahasa tidak lagi memiliki fungsi komunikasi saat penuturnya habis (*vernacular*) mengalami “punah” (Crystal 2000). Bahasa masih bertahan dalam fungsi: referensi kultural dan religius [mitis]. Kebertahanan fungsi referensi kultural dan religius (mitis) dapat mempertahankan vitalitas kebudayaannya. Kebertahanan itu juga masih dapat mempertahankan identitasnya. Namun, fungsi vernakular memang merupakan faktor

penting dalam memperkuat identitas, seperti kasus “kreol”. Kebertahanan bahasa dan **kebudayaan** tergantung pada: kebanggaan dan kesetiaan bahasa. Kebanggaan dan kesetiaan bahasa dipengaruhi oleh faktor luar bahasa (bahasa saingan, ekonomi, politik, emansipasi sosial....)

Berdasarkan temuan penelitian khususnya untuk kasus toponimi kelurahan di Kota Depok dapat diidentifikasi mulai: penggunaan jumlah kata (tunggal/jamak), huruf latin awal yang digunakan selain huruf (**E,F,I,N,O,Q,U,V,W,X,Y,Z**) asal bahasa lokal/*demonym* (Sunda, Jawa, dialek betawi, dialek Banten atau asing (Arab, Belanda, Sanskerta/Jawa Kuno, Melayu dan ada yang tidak diketahui (tunggal, gabungan), menggunakan nama generik saja, generik–spesifik, spesifik-spesifik, spesifik mengandung generik, generik-generik-spesifik. Berdasarkan refleksi pengalaman dan pengetahuan masyarakat yang berorientasi natural dan kultural, untuk masyarakat Depok tempo dulu lebih berorientasi pengetahuan natural yang digunakan dalam pemberian nama tempatnya, dan kecenderungannya generik *hydronym* selain orientasi natural flora. Hal ini menunjukkan melalui kajian toponimi satuan nama kelurahan yang ada di Kota Depok, dihasilkan bahwa masyarakat Kota Depok masa lalu sudah terjadi pluralitas bahasa atau terjadi identitas interaksional, berorientasi natural yang beradaptasi dengan perairan dan juga memiliki kemampuan deskripsi spesifik untuk 63 nama kelurahan yang ada. Pola keruangan dari nama-nama tempat tersebut dapat diinterpretasi bahwa awal permukiman di kota Depok di bagian tengah kota, dari timur ke barat kota yang nama spesifiknya lebih kental. Adapun di bagian selatan dan utara kota kecenderungannya mengindikasikan penggunaan nama berorientasi natural (Taquyuddin, 2015). Di kota Depok jika dilakukan penelitian untuk satuan yang lebih terperinci dan detail, sudah banyak terjadi penambahan nama baru perubahan nama-nama tempat yang indikasinya dilakukan oleh para pengembang kompleks perumahan. Hal ini lambat laun mengikis nama-nama lama karena lebih menekankan orientasi tren pencitraan untuk memenuhi tuntutan pasar tanpa memperhatikan akar budaya yang ada. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri di berbagai kota-kota di Indonesia. Bagaimana regulasi dalam memberikan nama baru untuk suatu tempat yang dahulunya sudah ada namanya, seperti kasus-kasus urbanisasi wilayah atau pemekaran daerah, angka migrasi yang tinggi di kota-kota besar mengindikasikan keterdesakan pendukung bahasa lokal sehingga terjadi vernakular (habis penuturnya), kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa lokal tidak mampu bertahan dan pada akhirnya vitalitas budayapun menjadi melebur hingga lambat laun punah. Praktik-praktik seperti ini jika

tidak segera ada tata aturannya maka mempercepat punahnya toponimi asli (punahnya identitas esensial). Permasalahan *gezzetter* untuk nama-nama yang ada saja merupakan pekerjaan yang besar, sehingga tata kelola penamaan tempat baru menjadi bukan prioritas.

Punahnya toponim tidak hanya dikarenakan fenomena kultural atau konstruksi sosial yang dinamis; bahasa saingan, ekonomi, politik, dan emansipasi sosial. William F. Mackey (1973, 5-16), mengungkapkan indikator *language power* yaitu faktor demografis (penutur), sebaran (di mana saja penutur), mobilitas (pergerakan penutur), ideologi (nasionalisme, kepentingan religi) dan kultural (referensi kultural) yang sedang bekerja dan menunjukkan “tinggi dan rendahnya” identitas.

Di sisi lain punahnya toponim juga dapat terjadi karena fenomena natural, misal; terjadinya aktifitas vulkanik banyak unsur-unsur geografi hanya tinggal nama (secara lokasional sulit diidentifikasi kembali); terjadinya tsunami, terjadi naiknya permukaan air laut, gempa bumi, banjir bandang, longsor dan lain-lain. Bahkan tidak hanya toponim yang hilang terkubur, berpindah, bergabung dengan yang lain, tetapi budaya pendukungnya pun ikut punah. Dalam konteks ini toponimi masuk dalam ranah potensi sistem arkeologis yang menjadi penting untuk direkonstruksi.

Solusi bersama yang seperti apa untuk menghadapi fenomena ini. Sebenarnya sudah ada salah satu jawabannya, yaitu Resolusi 715 A (XXVII) PBB 23 April 1959, berdiri badan internasional *The United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN)*. Badan ini berfokus mengamatkan **pembakuan nama-nama geografis**; penyelenggaraan konferensi internasional dan mensponsori kelompok kerja internasional berdasar sistem **bahasa** serta melayani **konsultansi** kelompok kerja. Untuk menuju implementasi resolusi pembakuan nama-nama geografis ini, Indonesia melalui kursus yang diselenggarakan Bakosurtanal (saat ini BIG), bersama pakar dunia Prof. Jacob Rais dan Prof I Made Sandy memberikan dasar tentang toponimi, mengenali permasalahan dan mengatasinya, pengumpulan data di lapangan, eksonim, generik, dan *gezzetter*.

Kelompok kerja internasional berdasar sistem **bahasa**; 22 Divisi Linguistik/Geografis, yaitu: 1. Afrika Tengah; 2. Afrika Timur; 3. Afrika Selatan; 4. Afrika Barat; 5. Arab; 6. Asia Timur (selain Cina); **7. Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya**; 8. Asia Barat Daya (selain Arab); 9. Baltik; 10. Celtik; 11. Cina; 12. Negara-negara berbahasa Belanda dan Jerman (*Dutch and German-Speaking*); 13. Eropa Timur Tengah dan Tenggara; 14. Eropa Timur; 15. Selatan dan Asia

Tengah; 16.Mediterrania Timur (selain Arab); 17.Negara berbahasa Perancis (*French Speaking*); 17.India; 18.Amerika Latin; 19.Norden; 20.*RomanoHellenic*; 21.Kerajaan Inggris; 22.Amerika dan Kanada.

Sedangkan pengwilayahan Indonesia menurut bahasa (lihat Peta di bawah ini), (1989, Yusron Halim).



Bahasa merupakan suatu alat yang dipakai untuk melakukan komunikasi. Terdapat 32 bahasa utama di dunia ini (Dicken dan Pitts, 1970). Menurut Dicken dan Pitts, Indonesia termasuk ke dalam rumpun Bahasa Malayan Polynesian bersama dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian Filipina.

Bahasa yang beranekaragam ini dapat terjadi karena faktor geografis dari suatu daerah (Patriarca dan Heinsalu, 2008). Faktor-faktor ini tidak terkait dengan dinamika transmisi budaya, melainkan dengan distribusi populasi awal serta batas-batas geografis dan inhomogenitasnya, yang memodulasi proses difusi. Patriarca dan Heinsalu mengatakan bahwa faktor geografis yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman bahasa, yaitu: hambatan fisik batas air dan pegunungan atau fitur geofisik seperti jenis tanah dan distribusi spasial sumberdaya alam. Sedangkan menurut Randy J. LaPolla, dalam jurnalnya yang berjudul *Language Contact and Language Change in the History of the Sinitic Languages* yang dikatakan bahwa ada tiga faktor

utama yang terlibat dalam pembentukan rumpun bahasa, antara lain: asal genetik, pergerakan populasi, dan kontak antar bahasa lain (LaPolla, 2007).

Geografi dialek merupakan bagian dari dialektologi. Dialektologi terbagi menjadi dua, yaitu geografi dialek dan sosiolinguistik (Lauder, 2007). Geografi dialek membahas variasi bahasa berdasarkan tempat atau letak spasial, sedangkan sosiolinguistik ini membahas variasi bahasa menurut strata sosial. Sementara menurut Jakob Rais (2005), dalam pemberian nama suatu tempat terdapat ciri yang dapat dipedomani untuk pemberian nama-nama tempat baru. Berdasar penamaan geografi yang ada dapat dikenali bahwa susunan nama ditemukan ada dengan satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata bahkan lebih. Dari susunan tersebut terdapat pola susunan kata yang bersifat generik (indikasi geografis fisik) dan dilanjutkan dengan nama spesifiknya atau (*proper name*) sebagai penjelas; sifat, arah (mata angin), angka, dari suatu tempat.

### **Peran-peran dalam pembakuan nama-nama Geografis**

**Tenaga ahli dalam rumpun ilmu bahasa** sangat ditunggu perannya dalam pembakuan endonim (teks lokal) dan eksonim (teks bahasa Inggris), melakukan penelitian, pedoman transliterasi maupun transkripsi nama geografi di Indonesia, membuat *gezzetter*. Selain itu kelengkapan data yang penting juga diantaranya penulisan, ejaan, ucapan, rekaman bunyi (fonetik) menurut pendukung bahasa masing-masing saat ini serta arti yang dikandung nama tempat tersebut.

**Tenaga ahli sejarah** berperan mengidentifikasi, menginventarisasi, mendokumentasikan dan pengelolaan sejarah/riwayat endonim dan eksonim (sumber naskah, dokumen kuno, peta kuno, dan perkembangannya hingga kini serta sumber sejarah lainnya).

**Tenaga ahli dalam rumpun ilmu pengetahuan alam; geografi fisik/human**, berperan agar fokus dalam akurasi lokasional baik lokasi absolut (koordinat astronomis) maupun lokasi relatif (kedekatan nama-nama tempat di sekitarnya yang diasumsikan lebih dikenali). Selain berfokus menghasilkan kajian-kajian regional formal maupun fungsional/*nodal region* dari berbagai tema toponimi (dengan pendekatan keruangan/*spatial*), serta memperhatikan masukan dari berbagai bidang ilmu kebumih; klimatologi, hidrologi, geomorfologi, pedologi, biogeografi, geologi, dan lain-lain.

Jenis-jenis unsur geografis yang akan dibuat gezetternya:

1. **natural/alami daratan (generik)**: gunung, bukit, karst, plateau, dataran, lembah, punggung/igir, gua, pantai, pulau, beting, gosong, tombolo, tanjung, muara, wilayah iklim, wilayah, rawan bencana, wilayah kepadatan penduduk, dan lain-lain.
2. **alami vegetasi**: jenis/tipe hutan, kawasan konservasi, hutan lindung cagar alam,
3. **alami perairan (hydronym)**: danau, sungai, sungai bawah tanah, air terjun, rawa, selat, laut, atol, teluk, dan lain-lain.
4. **geografis semikultural** ; perkebunan, penggunaan tanah, bendungan/dam, permukiman dan lain-lain.
5. **kultural politis administratif (civil/political subdivisions of a country)**: dukuh, kampung, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, karisidenan, provinsi.
6. **kultural buatan** lain: jalan (*transportation route*), kanal/sodetan/setu, Bandara, monumen, mercusuar, dan lain-lain.
7. **kultural**: wilayah bahasa, wilayah subbahasa, wilayah etnis, wilayah subetnis, situs, kawasan cagar budaya, dan lain-lain.

**Tenaga Ahli Teknologi Kartografi**, berperan dalam menyeleksi penulisan baku berdasarkan skala peta (semakin besar skala semakin lengkap toponiminya), penempatan tulisan pada peta sebagai informasi identitas tempat (tidak terganggu dengan informasi isi peta yang lain; baik yang disimbolkan melalui titik, garis maupun area), memenuhi prinsip berbahasa dengan peta secara efektif, hierarkhi ukuran/*size* huruf dalam peta, (dalam kondisi tertentu boleh melakukan eksagerasi atau mengabaikan skala demi memunculkan kepentingan informasi nama tempat tersebut);memenuhi kaidah dan hakikat kartografi yang diakui secara nasional/Internasional; mengembangkan dokumen SNI terkait toponimi.

**Tenaga Ahli Teknologi Informasi**, mengembangkan sistem inventarisasi berbasis komunitas, mengembangkan sistem inventarisasi resmi mendukung lembaga yang berwenang, mengembangkan sistem otomasi pendataan/perekaman nama geografis untuk menghasilkan sampai level geseter/*gezetter* (berkolaborasi dengan berbagai ahli toponimi dari berbagai disiplin), mengembangkan aplikasi yang mendukung pembakuan toponimi pada *hardware* yang terkoneksi dengan jaringan *internet base* (misal aplikasi *handphone*), dengan didasari standardisasi *gezetter* yang diamanatkan oleh kebutuhan pembakuan nasional/internasional.



Membangun *gazetter* berbasis web yang dapat menjadi rujukan baku dari berbagai pelaku pembangunan, akademisi, pengusaha dan pelaku media sosial di web (seperti KBBI daring/*online*).

### **Sinergi (gotong royong proporsional)**

Mengingat besar dan banyak dan luasnya Indonesia maka diperlukan sinergi partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat maupun komunitas dan tentunya dengan strategi prioritas (sesuai kepentingan). Sinergi pelaksanaanya secara gotong royong meliputi dukungan masyarakat (fungsi kontrol; informan, narasumber lokal)-rekomendasi akademisi (fungsi tridarma perguruan tinggi; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)-dukungan pengusaha (fungsi: produksi, distribusi, komersialisasi)- pemerintah (fungsi: regulasi birokrasi, *budgeting*)-landasan hukum daerah/nasional/internasional (perda-pergub-permen-perpres-inpres-UU-Tap MPR - UUD - Resolusi PBB).

### **Daftar Pustaka**

- Alwi, Hasan. 1995. *Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud.
- Dicken, Samuel. Pitts, Forrest. 1970. *Introduction to Cultural Geography*. United States of America: Ginn and Company.
- Halim, Yusron, 1989.,(hal: 18) Memantau Toponimi dan Permasalahannya di Indonesia, Majalah Geografi Indonesia, Th. 2, no. 3.
- LaPolla, Randy J. 2007. *Language Contact and Language Change in the History of the Sinitic Languages*.Beijing: La Trobe University
- Lauder, Multamia. 1990. *Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tangerang*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Kadmon, N. 2000. *Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names*. Vantage Press. New York.
- Kasim, Yuslina. Dkk. 1987.*Pemetaan Bahasa Daerah di Sumatra Barat dan Bengkulu*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Kota Depok, Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok.

- Rais, Jakob, 2005., *Pedoman Penulisan Nama Unsur Geografi di Indonesia. Makalah Semiloka ITB. Bandung*
- Rais, Jacob. 2006. Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi (Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia). ITB. Bandung.
- Rais, Jacob, *et al.* (2008). *Toponimi: Sejarah Budaya yang Panjang dari Pemukiman Manusia dan Tertib Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugandi, Yulia., 2000., (hal: 45 – 49), Prolegomena sosiologis, Identifikasi Kultural Dalam Situs, PIAMI VII, Yogyakarta.
- Taqyuddin, 2015., Sudut Pandang Keruangan Panamaan Kelurahan di Kota Depok (Kajian Toponimi/KTN), Departemen Arkeologi FIB, Universitas Indonesia
- Tichelaar, T.R. (Ed.). 1990. Proceedings of the Workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia. Bakosurtanal UNGEGN Workshop.
- Timadar, Rian. 2008. Persebaran Data Arkeologi di Depok Abad 17—19 M. Sebagai Kajian Awal Rekonstruksi Sejarah Permukiman Depok. Sekripsi Arkeologi: FIB-UI.
- Trohaedi, Aya. 2003. *Pedoman Penelitian Dialektologi*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Sumber internet:

- Taqyuddin, 2008., *Onomastika (Toponymi Indonesia)*., Departemen Geografi Fmipa UI.
- Depok News, 2011., *Sejarah Kota Depok*, Diakses dari <http://depoknews.com/sejarah-kota-depok/> .30/Okt 2016.